

Membangun Kelayakan Strategik Pendidikan Tinggi Islam Melalui Penjaminan Mutu

Fathul Anwar^{1*}, Nur Huda Sari¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: Fathulanwar77@gmail.com*

Abstrak

Kajian ini menyoroti peran strategis penjaminan mutu sebagai fondasi utama dalam membangun kelayakan institusional pendidikan tinggi Islam. Penjaminan mutu tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi atau pemenuhan syarat akreditasi, melainkan sebagai refleksi dari kesiapan dan kapasitas institusi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara bermutu, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di berbagai perguruan tinggi Islam telah menunjukkan kemajuan awal, terutama pada tahap penyusunan dokumen-dokumen utama. Namun, implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja sivitas akademika. Berbagai kendala internal, seperti rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pentingnya mutu, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan anggaran, menjadi faktor penghambat utama efektivitas pelaksanaan SPMI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi penguatan mutu yang komprehensif melalui empat pendekatan: kepemimpinan transformasional, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi sistem mutu, serta integrasi nilai-nilai keislaman dengan visi akademik. Pendekatan ini menegaskan bahwa penjaminan mutu bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sarana transformasi strategis yang memperkuat identitas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi Islam, serta memperluas daya saing di tingkat lokal, nasional, dan global.

Kata Kunci: Stategik; Pendidikan Tinggi; Islam; Penjaminan Mutu

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, peran ini menjadi semakin kompleks karena tidak hanya mengemban tanggung jawab akademik, tetapi juga moral dan spiritual. Lembaga pendidikan tinggi Islam dituntut untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sekaligus mampu menjawab tantangan globalisasi, modernitas, dan transformasi digital yang terus berkembang. Untuk itu, dibutuhkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan sebagai

fondasi utama dalam membangun kelayakan institusi pendidikan tinggi Islam secara strategis.¹

Kelayakan institusi pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari aspek administratif atau kepatuhan terhadap regulasi semata, melainkan juga mencerminkan kapasitas institusi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Kelayakan strategik berarti institusi mampu mengembangkan sistem internal yang tangguh, memiliki arah pengembangan jangka panjang yang jelas, serta menjalankan fungsi akademik dan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dalam kerangka ini, sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai instrumen utama yang menghubungkan antara kondisi aktual institusi dengan standar ideal yang ditetapkan oleh negara, lembaga akreditasi, dan kebutuhan masyarakat.

Berbagai institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan geografis dan ekonomi, memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat peradaban Islam di tingkat lokal maupun nasional. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan manajerial, hingga kesenjangan dalam adaptasi teknologi dan digitalisasi masih menjadi hambatan dalam mencapai mutu institusi yang ideal. Oleh karena itu, membangun kelayakan strategik menjadi kebutuhan yang mendesak agar institusi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mendorong seluruh perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam, untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem ini merupakan syarat dasar dalam proses akreditasi dan penjaminan kualitas institusi. SPMI meliputi penyusunan dokumen mutu, pelaksanaan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta pelibatan seluruh unit kerja dalam membangun budaya mutu. Namun dalam praktiknya, implementasi SPMI masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak

¹ G Rosalina, I F R Ibnu Fatkhu Royana, and N A Rohmansyah, 'Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Upgris 2021-2022', 2022, 23–34 <<https://doi.org/10.15642/jkpi.2025.15.1.23-33>>.

institusi yang belum sepenuhnya menjadikan penjaminan mutu sebagai bagian integral dari strategi pengembangan, melainkan sekadar sebagai kewajiban administratif.²

Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik, sistematis, dan kontekstual dalam membangun kesadaran dan komitmen terhadap mutu di lingkungan perguruan tinggi Islam. Penjaminan mutu harus dipandang sebagai alat transformasi kelembagaan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membentuk daya saing dan karakter kelembagaan yang kuat. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar epistemologi dalam sistem mutu, maka pengembangan kualitas tidak sekadar meniru standar global, tetapi dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keislaman yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan strategik dalam membangun kelayakan institusi pendidikan tinggi Islam setidaknya mencakup tiga aspek utama: Tata kelola kelembagaan, yang meliputi kepemimpinan yang visioner, sistem informasi yang akurat, kebijakan berbasis data, serta pengambilan keputusan yang partisipatif dan akuntabel. Penguatan budaya mutu, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dan internalisasi nilai-nilai mutu dalam kehidupan kampus secara menyeluruh. Pengembangan sumber daya manusia, yang mencakup pelatihan berkala, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, serta sistem evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan³.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah secara mendalam peran strategis penjaminan mutu dalam penguatan kelayakan institusional pendidikan tinggi Islam. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), laporan implementasi mutu di perguruan tinggi

² Khairuddin, Nuriza Acela, and Suwandi, 'Penjaminan Mutu Pendidikan Islam Di STAI Darul Qur'an Aceh Tenggara', *Bunayya*, 3.1 (2022), 82–94.

³ Imam Wahyudi and others, 'Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Perguruan Tinggi', *Jabilah : Journal of Social Community*, 6.2 (2021), 126–40.

Islam, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, analisis dokumen, dan telaah kritis terhadap teori serta praktik penjaminan mutu dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan strategi penguatan mutu yang muncul dari berbagai sumber. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penerapan SPMI, faktor-faktor penghambatnya, serta pendekatan strategis yang dapat diterapkan dalam membangun budaya mutu berkelanjutan di perguruan tinggi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu telah menjadi isu sentral dalam pengelolaan pendidikan tinggi modern, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi Islam. Dalam konteks global, mutu tidak hanya menjadi simbol keunggulan institusi, melainkan juga menjadi parameter utama dalam penilaian akreditasi, kerjasama internasional, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Pendidikan tinggi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika dunia kerja dan masyarakat global. Untuk itu, setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, penjaminan mutu pendidikan tinggi didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan oleh institusi untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas dan hasil layanan akademik dan non-akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta peningkatan mutu yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan institusional dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁴

⁴ Muhammad Adlan Nawawi, 'Implementasi Kepemimpinan Dalam Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Sekolah Tinggi Agama Islam', *Andragogi*, 2.1 (2020), 41–65.

Dasar hukum pelaksanaan penjaminan mutu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 52 hingga 55, yang menegaskan bahwa penjaminan mutu dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan sistem yang dikembangkan dan dijalankan secara mandiri oleh perguruan tinggi dalam rangka menjamin kualitas internal institusi. Sementara itu, SPME dilakukan oleh lembaga eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk menilai dan mengakreditasi program studi maupun institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

Secara praktis, pelaksanaan SPMI mengikuti kerangka kerja yang dikenal dengan siklus PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan mutu.⁵ Model ini diadopsi dari prinsip continuous quality improvement (CQI) yang banyak digunakan dalam sistem manajemen mutu⁶ internasional. Dalam siklus ini:

1. Perencanaan mencakup penetapan standar mutu dan indikator keberhasilan,
2. Pelaksanaan mengacu pada implementasi aktivitas sesuai standar,
3. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana standar telah dicapai,
4. Pengendalian bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dan kendala,
5. dan Peningkatan diarahkan untuk mengembangkan standar dan memperbaiki kelemahan.

Dengan siklus ini, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mampu menjaga kualitas, tetapi juga mampu berkembang secara adaptif dan inovatif. Penerapan PPEPP menjadi indikator kunci dalam akreditasi oleh BAN-PT maupun LAM dan harus dibuktikan melalui dokumen mutu dan praktik nyata di lapangan.

Dalam konteks Pendidikan Tinggi Islam, penjaminan mutu memperoleh dimensi yang lebih kompleks dan mendalam. Lembaga pendidikan tinggi Islam tidak hanya bertugas

⁵ Y Hanafi, 'Peningkatan Mutu Kampus STIT Muhammadiyah Ngawi Melalui Rekonstruksi Leadership', *Journal J-Mpi: Jurnal Manajemen ...*, 2022.

⁶ Ihwan Fauzi and Muhammad In'am Esha, 'Model Pengembangan Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Kriteria Malcolm Baldrige Di Perguruan Tinggi Islam', *Tadbir Muwahhid*, 6.2 (2022), 165–83 <<https://doi.org/10.30997/jtm.v6i2.5062>>.

sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pusat pengembangan nilai-nilai keislaman dan keilmuan yang bercirikan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu, kelayakan strategik dalam pendidikan tinggi Islam harus dibangun di atas tiga dimensi utama, yaitu: keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan.

1. Dimensi keislaman menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islam dalam seluruh aspek kehidupan kampus. Hal ini mencakup integrasi nilai Islam dalam visi dan misi institusi, kurikulum berbasis tauhid, pengembangan karakter mahasiswa, hingga tata kelola kelembagaan yang amanah dan profesional. Mutu dalam pendidikan tinggi Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ilahiyah yang menjadi dasar filosofis dan praksis institusi. Dengan demikian, penjaminan mutu di pendidikan tinggi Islam harus menjamin keberlangsungan nilai-nilai tersebut, baik dalam proses maupun hasil pendidikan.
2. Dimensi keilmuan mengacu pada tuntutan untuk menghasilkan lulusan dan karya akademik yang unggul, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks ini, penjaminan mutu berperan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan secara profesional, berbasis standar nasional, dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kontekstual⁷. Pendidikan tinggi Islam harus mampu menyeimbangkan antara penguatan keilmuan klasik (turats) dan respons terhadap tantangan kontemporer.
3. Dimensi keindonesiaan menegaskan bahwa pendidikan tinggi Islam juga memiliki peran kebangsaan. Lembaga pendidikan tinggi Islam dituntut untuk menghasilkan lulusan yang cinta tanah air, berjiwa nasionalis, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dalam hal ini, penjaminan mutu juga mencakup aspek kebijakan kelembagaan yang inklusif, pemberdayaan masyarakat sekitar kampus, serta penguatan peran institusi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi Islam juga tidak bisa dilepaskan dari pendekatan manajemen strategik. Institusi yang memiliki kelayakan strategik adalah institusi yang memiliki visi jangka panjang, strategi pencapaian yang terukur, serta tata kelola yang

⁷ Faridah Alawiyah, 'Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2.1 (2011), 63–78.

adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Menurut pendekatan ini, penjaminan mutu bukan sekadar mekanisme kontrol, tetapi juga menjadi alat manajemen perubahan (change management tool) yang memungkinkan institusi bertahan dan berkembang di tengah kompetisi global.

Lebih lanjut, konsep Total Quality Management (TQM) juga relevan dalam konteks ini. TQM menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam peningkatan mutu⁸. Dalam pendidikan tinggi Islam, TQM mencakup partisipasi aktif pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan alumni dan mitra kerja, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan mutu. Prinsip TQM juga menekankan pentingnya kepuasan pelanggan (stakeholders), pengukuran kinerja, dan evaluasi berkelanjutan.

Dalam praktiknya, implementasi penjaminan mutu yang sukses di pendidikan tinggi Islam memerlukan komitmen kepemimpinan, budaya mutu yang kuat, serta sistem informasi yang andal.⁹ Tanpa komponen-komponen ini, maka SPMI hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan institusi. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi untuk membangun ekosistem mutu yang berakar pada nilai-nilai Islam, berpijak pada standar nasional, dan berorientasi pada transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

B. Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Islam

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang bertujuan melahirkan generasi intelektual yang berakhlak mulia, berilmu, dan berdaya saing, setiap perguruan tinggi Islam perlu menyadari pentingnya penjaminan mutu sebagai pilar utama dalam tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien¹⁰. Dalam kerangka tersebut, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan langkah strategis yang harus dijalankan secara

⁸ R Supyan Sauri, 'Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Islam Nusantara Bandung', *Media Nusantara*, 2019, 27–40.

⁹ Farihul Lutfi and Hanim Afifudin, 'Model Penjaminan Mutu Internal Dalam Membangun Daya Saing Kampus Dakwah Dan Peradaban (Study Exploratory Sequential Mixed Method Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)', 5 (2024), 1983–2006.

¹⁰ Muhammad Syahril Harahap and others, 'Kajian Implementasi Spmi (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, 11.1 (2023), 447–80 <<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4616>>.

konsisten, berkesinambungan, dan menyeluruh, guna meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi¹¹.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbagai perguruan tinggi Islam telah mengembangkan perangkat SPMI yang umumnya mencakup empat elemen utama: (1) Kebijakan Mutu, (2) Manual Mutu, (3) Standar Mutu, dan (4) Formulir Mutu¹². Keempat dokumen ini disusun sebagai dasar operasional dan administratif pelaksanaan penjaminan mutu, serta menjadi pedoman dalam membangun siklus peningkatan mutu berkelanjutan melalui model PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Namun, dalam praktiknya, implementasi SPMI di berbagai institusi pendidikan tinggi Islam masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya kelembagaan. Kegiatan penjaminan mutu belum menjadi bagian dari sistem nilai, pola kerja, dan cara berpikir seluruh sivitas akademika, yang berdampak pada efektivitas sistem mutu secara keseluruhan¹³.

1. Ketersediaan Dokumen Mutu

Secara administratif, sebagian besar institusi telah menunjukkan komitmen awal yang baik melalui penyusunan dokumen-dokumen mutu. Dokumen kebijakan menetapkan komitmen institusi terhadap pencapaian mutu akademik dan non-akademik. Manual mutu menjabarkan proses mutu dan alur tanggung jawabnya. Standar mutu dirancang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), mencakup aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola. Formulir mutu digunakan sebagai alat dokumentasi implementasi standar mutu, seperti evaluasi dosen, laporan monitoring, dan pengukuran kepuasan mahasiswa.

Namun demikian, keberadaan dokumen ini belum otomatis menjamin keterlaksanaan SPMI secara menyeluruh. Masih banyak bagian dari dokumen yang belum dipahami secara

¹¹ Alwan Suban, 'Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi', *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8.2 (2020), 79 <<https://doi.org/10.31958/jaf.v8i2.2434>>.

¹² Abdillah, Amril Mustofa, and Novita Sari, 'Penjaminan Mutu External Di Lembaga Pendidikan', *Jurnal Dharmawangsa*, 2012, 46–50.

¹³ Sunardi, Abdul Fadlil, and Ryan Fitriani Pahlevi, 'Pengambilan Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan MOORA, SAW, WP, Dan WSM', *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5.2 (2021), 350–58 <<https://doi.org/10.29207/resti.v5i2.2977>>.

komprehensif oleh pelaksana di tingkat program studi atau unit teknis. Beberapa indikator mutu yang digunakan masih bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan parameter yang terukur, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pengendalian mutu secara efektif.

2. Rendahnya Internalisasi Budaya Mutu

Salah satu tantangan utama implementasi SPMI adalah rendahnya internalisasi budaya mutu. Budaya mutu adalah kesadaran kolektif seluruh elemen organisasi, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa terhadap pentingnya mutu sebagai prinsip kerja utama. Sayangnya, di banyak institusi, kegiatan mutu masih dipandang sebagai kewajiban administratif menjelang akreditasi, bukan sebagai proses reflektif dan inovatif yang berkelanjutan.

Budaya mutu seharusnya dibentuk melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan nilai kelembagaan. Namun, upaya ini sering kali masih berada pada tahap awal, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan SPMI antarunit atau antarprogram studi.

3. Pelaksanaan Siklus PPEPP yang Belum Terstruktur

SPMI mengharuskan pelaksanaan siklus PPEPP secara sistematis dan berkesinambungan. Namun dalam realitasnya, pelaksanaan siklus ini sering kali belum terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

- a) Perencanaan mutu dilakukan tanpa analisis kebutuhan strategis dan minim pelibatan pemangku kepentingan.
- b) Pelaksanaan standar mutu masih bergantung pada kapasitas individu, bukan sistem.
- c) Evaluasi mutu belum menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.
- d) Pengendalian belum menjadi bagian dari pengawasan rutin.
- e) Peningkatan mutu belum didasarkan pada refleksi institusional yang sistematis.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPEPP belum menjadi siklus yang hidup dan fungsional, sehingga efektivitas SPMI masih belum optimal.

4. Kapasitas Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang Terbatas

Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang dibentuk secara struktural di banyak institusi sering kali belum memiliki kapasitas yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya pelatihan, terbatasnya anggaran, serta kurangnya kewenangan

operasional menjadikan UPM lebih sebagai simbol kelembagaan daripada motor penggerak mutu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang seharusnya menjadi tugas utama UPM belum dapat dijalankan secara optimal. Padahal, agar SPMI berjalan efektif, UPM harus diberdayakan sebagai agen perubahan (change agent) yang mampu memberikan pendampingan, melaksanakan audit internal, memfasilitasi pelatihan, serta menjadi penghubung antara pimpinan dan unit-unit pelaksana akademik maupun non-akademik.

5. Orientasi Reaktif terhadap Akreditasi

Fenomena umum yang masih terjadi di sejumlah perguruan tinggi adalah pendekatan reaktif terhadap akreditasi. Aktivitas penjaminan mutu cenderung diintensifkan menjelang proses asesmen eksternal dari BAN-PT atau LAM, sementara di luar periode itu kegiatan mutu sering kali melemah. Orientasi ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu belum menjadi bagian dari strategi jangka panjang institusi, melainkan hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan persyaratan formal. Pendekatan semacam ini tidak hanya membatasi efektivitas SPMI, tetapi juga berisiko menurunkan integritas dan akuntabilitas sistem mutu itu sendiri.

C. Tantangan Internal dalam Implementasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Islam

Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan berkelanjutan, banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan internal yang cukup kompleks. Tantangan ini umumnya bersumber dari kondisi kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)¹⁴. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi meliputi rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pentingnya mutu, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap belum optimalnya pencapaian kelayakan strategik lembaga pendidikan tinggi Islam.

¹⁴ Anindita Rossa Herdyaningrum and Faiz Muzakki, 'Dampak Penjaminan Mutu Eksternal Di Perguruan Tinggi', 2 (2025).

1. Rendahnya Pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap Pentingnya Mutu

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pelaksanaan SPMI adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia terhadap pentingnya mutu pendidikan. Dosen, tenaga kependidikan, maupun unsur pimpinan di berbagai unit kerja belum sepenuhnya memiliki persepsi yang seragam dan mendalam mengenai konsep mutu, urgensinya, serta dampaknya terhadap daya saing institusi. Mutu masih kerap dipahami secara sempit, terbatas pada kelengkapan administratif atau persyaratan akreditasi eksternal, bukan sebagai proses strategis yang mencakup perbaikan berkelanjutan, inovasi akademik, dan penciptaan nilai kelembagaan.

Akibat kurangnya pemahaman tersebut, partisipasi aktif dalam kegiatan penjaminan mutu, seperti penyusunan dokumen standar, evaluasi diri, pengisian instrumen monitoring, dan pelatihan peningkatan mutu, masih rendah. Tidak jarang kegiatan mutu dianggap sebagai tanggung jawab Unit Penjaminan Mutu (UPM) semata, bukan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen institusi. Akibatnya, banyak proses mutu berjalan secara parsial, terputus, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya mutu (quality culture) belum terbentuk secara menyeluruh. Padahal, budaya mutu merupakan pondasi penting dalam membangun sistem mutu yang hidup dan berkelanjutan. Mutu bukan sekadar capaian nilai atau skor akreditasi, tetapi nilai yang harus menjiwai seluruh aktivitas akademik dan administratif.

2. Belum Optimalnya Sistem Monitoring dan Evaluasi

Tantangan berikutnya yang cukup signifikan adalah belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan standar mutu di seluruh unit kerja. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus PPEPP Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang bertujuan mengukur pencapaian standar, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan strategi perbaikan.

Namun di banyak perguruan tinggi Islam, kegiatan monev masih dilakukan secara terbatas, belum menggunakan instrumen yang baku, terukur, dan terintegrasi. Evaluasi standar mutu seringkali dilakukan secara reaktif menjelang audit eksternal, bukan sebagai kegiatan rutin berbasis data. Instrumen monev pun belum sepenuhnya mengacu pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang sesuai dengan konteks institusi.

Di sisi lain, kelemahan juga terdapat pada aspek pengumpulan dan pengelolaan data. Masih banyak institusi yang belum memiliki sistem informasi mutu yang terintegrasi dan digital, sehingga proses pelaporan dan analisis data berlangsung secara manual dan tidak efisien. Dampaknya, pengambilan keputusan oleh pimpinan tidak selalu didasarkan pada data yang sah dan objektif, melainkan berdasarkan asumsi atau pengalaman semata. Hal ini menghambat perbaikan mutu secara berkelanjutan dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan kelembagaan.

Monitoring dan evaluasi seharusnya menjadi sarana umpan balik (feedback) yang bermanfaat, tidak hanya untuk mencatat kelemahan, tetapi juga untuk mengidentifikasi keberhasilan, praktik baik (best practices), serta potensi inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen mutu harus menjadi prioritas dalam agenda pengembangan mutu.

3. Keterbatasan Anggaran untuk Pelatihan dan Peningkatan Kualitas

Faktor internal lain yang juga menjadi tantangan serius dalam implementasi SPMI adalah keterbatasan anggaran untuk pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan mutu kelembagaan secara menyeluruh. Kegiatan seperti pelatihan, workshop, bimbingan teknis, hingga studi banding sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menjalankan sistem mutu. Namun, keterbatasan dana sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya.

Lebih jauh, alokasi anggaran mutu di banyak perguruan tinggi Islam masih bersifat insidental dan belum direncanakan secara rutin dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sebagian besar dana baru dialokasikan menjelang proses akreditasi eksternal, bukan sebagai investasi jangka panjang dalam penguatan kelembagaan.

Kondisi ini berdampak pada stagnasi kapasitas kelembagaan dalam manajemen mutu, minimnya pembaruan dalam sistem pembelajaran dan layanan akademik, serta rendahnya inovasi kelembagaan berbasis mutu. Dalam jangka panjang, keterbatasan investasi mutu akan memperlemah daya saing perguruan tinggi Islam dalam menghadapi dinamika nasional maupun global.

D. Strategi Pembangunan Kelayakan

Untuk mewujudkan kelayakan strategik dalam pendidikan tinggi Islam, dibutuhkan pengembangan strategi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan kontekstual dengan karakteristik kelembagaan keislaman. Strategi ini tidak hanya menekankan pada penguatan teknis dalam sistem penjaminan mutu internal, tetapi juga mencakup aspek kultural, kepemimpinan, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi manajerial dan akademik. Setidaknya terdapat empat pendekatan strategis yang dapat menjadi fondasi dalam proses transformasi mutu yang kokoh dan berkelanjutan:

1. Penguatan Kepemimpinan Transformasional

Salah satu faktor kunci dalam membangun kelayakan institusi pendidikan tinggi Islam adalah hadirnya kepemimpinan transformasional yang memiliki orientasi visi jangka panjang serta komitmen terhadap kualitas. Pimpinan lembaga berperan strategis dalam membentuk arah kebijakan mutu dan menggerakkan seluruh elemen institusi untuk terlibat aktif dalam implementasinya.

Kepemimpinan transformasional ditandai oleh kemampuan untuk memberi inspirasi, menjadi teladan, mendorong budaya inovasi, dan menjalin relasi kuat dengan seluruh sivitas akademika. Dalam konteks penjaminan mutu, pimpinan tidak cukup hanya mengeluarkan instruksi administratif, tetapi juga harus menunjukkan keteladanan melalui keterlibatan langsung dalam proses evaluasi, monitoring, serta pemanfaatan data mutu dalam pengambilan keputusan. Iklim akademik yang terbuka terhadap inisiatif, keberanian berubah, dan penghargaan terhadap kontribusi kolektif akan mendorong terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi Islam.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pilar strategis kedua adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara sistematis dan berkelanjutan. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan aktor utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat operasional, sehingga peningkatan kompetensi mereka menjadi prioritas penting.

Untuk itu, diperlukan program pelatihan dan pengembangan SDM yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan (*need-based training*), yang diawali dengan pemetaan kompetensi dan analisis kesenjangan (*gap analysis*). Fokus pelatihan dapat mencakup

pemahaman sistem mutu, kompetensi pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran, hingga keterampilan manajerial. Pengembangan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar akreditasi, tetapi juga membentuk karakter insan akademik yang beretika, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. SDM yang unggul dan bermutu akan memperkuat posisi perguruan tinggi Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatkan daya saing institusi secara menyeluruh.

3. Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu

Transformasi digital merupakan strategi penting dalam penguatan kelayakan institusi pendidikan tinggi. Digitalisasi sistem penjaminan mutu melalui pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan data dalam pelaksanaan siklus mutu.

Perguruan tinggi Islam perlu mengembangkan atau mengadopsi Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPM) yang terintegrasi dan mampu mendukung proses PPEPP—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian mutu secara terdokumentasi. SIPM memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap data evaluasi dosen, kepuasan mahasiswa, audit mutu internal, serta progres implementasi standar mutu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, integrasi SIPM dengan sistem informasi akademik, keuangan, dan kepegawaian akan menciptakan tata kelola institusi yang lebih sinkron dan adaptif. Pemanfaatan teknologi digital ini sejalan dengan tuntutan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang menekankan pada ketangkasan institusi, pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), serta respons cepat terhadap perubahan lingkungan.

4. Integrasi Visi Keislaman dan Akademik

Sebagai institusi yang berbasis nilai-nilai Islam, perguruan tinggi Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem mutu yang tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, strategi pembangunan kelayakan perlu diarahkan pada integrasi antara visi keislaman dengan dimensi akademik dan manajerial.

Langkah konkret dapat dilakukan melalui penyusunan standar mutu yang mencakup indikator spiritualitas, etika Islam, serta kontribusi terhadap masyarakat. Misalnya, dalam

pembelajaran, standar tidak hanya menekankan capaian kognitif, tetapi juga pembentukan akhlak, kepemimpinan islami, dan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian, standar dapat diarahkan pada isu-isu sosial-keagamaan, pengembangan pemikiran Islam, dan pemberdayaan umat.

Integrasi visi keislaman ini akan memberikan kekhasan tersendiri bagi perguruan tinggi Islam dalam mengembangkan mutu institusinya, sekaligus memastikan bahwa proses pendidikan yang dilakukan benar-benar melahirkan insan kamil yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu merupakan pilar strategis dalam membangun kelayakan institusional pendidikan tinggi Islam. Kelayakan strategik tidak semata-mata diartikan sebagai kepatuhan terhadap regulasi atau pemenuhan syarat akreditasi, tetapi merupakan refleksi dari kesiapan dan kapasitas institusi untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi secara bermutu, adaptif, dan berkelanjutan.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di berbagai perguruan tinggi Islam menunjukkan adanya kemajuan awal, terutama dalam hal penyusunan dokumen-dokumen utama seperti kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Namun demikian, implementasi sistem ini pada umumnya masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja seluruh sivitas akademika.

Sejumlah tantangan internal masih menjadi hambatan signifikan, di antaranya adalah rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pentingnya mutu, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Tantangan-tantangan ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.

Untuk itu, diperlukan strategi pembangunan mutu yang terstruktur dan kontekstual, dengan menekankan pada empat pendekatan utama berikut:

1. Penguatan kepemimpinan transformasional, di mana pimpinan institusi menjadi penggerak utama dalam membangun budaya mutu;

2. Pengembangan sumber daya manusia, melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan;
3. Digitalisasi sistem penjaminan mutu, untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data;
4. Integrasi visi keislaman dan akademik, agar standar mutu yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial keislaman dalam seluruh proses akademik.

Dengan pendekatan tersebut, penjaminan mutu tidak lagi dipandang sebagai instrumen administratif semata, melainkan sebagai alat transformasi strategis yang mampu memperkuat identitas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi Islam, serta mendorong daya saing institusi secara lokal, nasional, maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Amril Mustofa, and Novita Sari, 'Penjaminan Mutu External Di Lembaga Pendidikan', *Jurnal Dharmawangsa*, 2012, 46–50
- Alawiyah, Faridah, 'Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2 (2011), 63–78
- Fauzi, Ihwan, and Muhammad In'am Esha, 'Model Pengembangan Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Kriteria Malcolm Baldrige Di Perguruan Tinggi Islam', *Tadbir Muwahhid*, 6 (2022), 165–83 <<https://doi.org/10.30997/jtm.v6i2.5062>>
- Hanafi, Y, 'Peningkatan Mutu Kampus STIT Muhammadiyah Ngawi Melalui Rekonstruksi Leadership', *Journal J-Mpi: Jurnal Manajemen ...*, 2022
- Harahap, Muhammad Syahril, Syawal Gultom, . Darwin, . Rosnelli, and Nur Hidayah Fithriyah, 'Kajian Implementasi Spmi (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, 11 (2023), 447–80 <<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4616>>
- Herdyaningrum, Anindita Rossa, and Faiz Muzakki, 'Dampak Penjaminan Mutu Eksternal Di Perguruan Tinggi', 2 (2025)
- Khairuddin, Nuriza Acela, and Suwandi, 'Penjaminan Mutu Pendidikan Islam Di STAI Darul Qur'an Aceh Tenggara', *Bunayya*, 3 (2022), 82–94

- Lutfi, Farihul, and Hanim Afifudin, 'Model Penjaminan Mutu Internal Dalam Membangun Daya Saing Kampus Dakwah Dan Peradaban (Study Exploratory Sequential Mixed Method Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)', 5 (2024), 1983–2006
- Nawawi, Muhammad Adlan, 'Implementasi Kepemimpinan Dalam Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Sekolah Tinggi Agama Islam', *Andragogi*, 2 (2020), 41–65
- Rosalina, G, I F R Ibnu Fatkhu Royana, and N A Rohmansyah, 'Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Upgris 2021-2022', 2022, 23–34 <<https://doi.org/10.15642/jkpi.2025.15.1.23-33>>
- Sauri, R Supyan, 'Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Islam Nusantara Bandung', *Media Nusantara*, 2019, 27–40
- Suban, Alwan, 'Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi', *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8 (2020), 79 <<https://doi.org/10.31958/jaf.v8i2.2434>>
- Sunardi, Abdul Fadlil, and Ryan Fitriani Pahlevi, 'Pengambilan Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan MOORA, SAW, WP, Dan WSM', *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5 (2021), 350–58 <<https://doi.org/10.29207/resti.v5i2.2977>>
- Wahyudi, Imam, Mohammad Nizarul Alim, Evi Malia, and Ika Oktaviana Dewi, 'Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Perguruan Tinggi', *Jabilah : Journal of Social Community*, 6 (2021), 126–40